

PEMBANGUNAN MASYARAKAT MELALUI PENDEKATAN PEMBERDAYAAN (PEOPLE CENTERED DEVELOPMENT)

Suherman

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar

E-mail: suherman_drs@gmail.com

ABSTRAK. Pembangunan merupakan upaya yang terencana dan terarah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat paradigma pembangunan ini, lebih menekankan pada "empowerment" (penguatan diri). Dalam pembangunan banyak masalah-masalah yang dihadapi untuk menuju perubahan yang diinginkan melalui kebijakan-kebijakan yang terstruktur yang pada akhirnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk. Untuk itu diperlukan *capability* dan *capacity organization*, yaitu unsur birokrasi pemerintahan yang kuat, dalam aspek administratif dan transformasi sosial budaya melalui pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: Pembangunan masyarakat- pemberdayaan

PENDAHULUAN

Pembangunan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan adalah pembangunan yang berpusat pada rakyat. Pembangunan ini merupakan upaya yang terencana dan terarah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini harus dicapai dengan cara-cara yang sesuai dengan asas-asas dasar partisipasi dan keadilan. Hasilnya harus dapat dilestarikan untuk kelangsungan hidup manusia.

Anggapan dasar dari pembangunan ini, bahwa manusialah yang menjadi fokus dan sumber pembangunan yang strategis. Pembangunan masyarakat menyangkut upaya yang terencana dan terarah untuk meningkatkan kemampuan dan potensitas anggota masyarakat dan memobilisasikan antusiasme mereka guna berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Pembangunan jenis ini menekankan pada *sustained development*, yang menuntut kemampuan masyarakat untuk membangun atas kekuatan sendiri, membangun dengan swasembada melalui *self-sustaining* dan *self to help and self for creative*.

Jadi, paradigma pembangunan ini, lebih menekankan pada "empowerment" (penguatan diri). Sehingga pendekatan ini berpendapat bahwa masyarakat harus

menggugat struktur dan situasi keterbelakangan secara simultan dalam berbagai tahapan.

Corten dan Carner (1993) menyatakan bahwa konsep pembangunan berpusat pada rakyat memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumberdaya pembangunan yang utama dan sebagai tujuan adalah kesejahteraan material dan spiritual. Menurutnya ada tiga tema penting sebagai konsep perencanaan yang berpusat pada rakyat:

1. Pendekatan akan dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri.
2. Kesadaran bahwa sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagian besar rumah tangga miskin.
3. Dibutuhkan kelembagaan baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber lokal.

Pembangunan ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat, kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan untuk melakukan control atas sumberdaya materi dan non-material yang penting. Pendekatan ini berupaya untuk membangkitkan kesadaran pada

masyarakat untuk menggugat sub-ordinasi mereka melalui organisasi lokal secara *bottom-up*. Dan, organisasi yang dianggap paling efektif adalah organisasi yang sesuai dengan kebutuhan praktis masyarakat yang kongkrit. Hal ini berkaitan dengan kesehatan, ketenagakerjaan, dan penyediaan pelayanan dasar.

Pada tahun 1956, PBB melalui Dewan Sosial Ekonomi, telah merumuskan pembangunan masyarakat merupakan suatu proses, baik usaha masyarakat sendiri yang berdasarkan prakarsa, inisiatif, kreativitas, dan kemandiriannya bersama-sama dengan pemerintah memperbaiki kondisi sosial, budaya dan ekonomi komunitas bersangkutan menjadi integritas bangsa dalam memberikan dukungan bagi kemajuan bangsa dan negara.

Menurut PBB pembangunan ini meliputi:

- a. Partisipasi masyarakat dalam memperbaiki kehidupannya didasarkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri
- b. Pelayanan dan bantuan teknis pemerintah untuk membangkitkan prakarsa, tekad untuk menolong diri sendiri, dan kesediaan membantu orang lain (self-help and self to other)

Masalah-masalah dalam pembangunan di Indonesia, antara lain meliputi:

- a. Masalah ketimpangan dan kemiskinan
- b. Masalah distribusi pendapatan
- c. Masalah kependudukan
- d. Masalah pengangguran
- e. Masalah wanita
- f. Masalah migrasi dan sektor informal
- g. Sistem ekonomi dalam transisi
- h. Masalah utang luar negeri, dan sebagainya

Perubahan-perubahan yang di inginkan

Selanjutnya Corten (1993) menyatakan bahwa ada tiga dasar untuk perubahan-perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat:

- a. memusatkan pemikiran dan tindakan kebijaksanaan pemerintah pada penciptaan keadaan yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada tingkat individual, keluarga dan komunitas.
- b. mengembangkan struktur dan proses organisasi yang berfungsi menurut akidah system swa-organisasi.
- c. mengembangkan system produksi-konsumsi yang diorganisasikan secara territorial yang berlandaskan kaidah pemilikan dan pengendalian local.

Pembangunan masyarakat berarti perubahan masyarakat yang terencana untuk meningkatkan dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Ada dua strategi yang diperlukan:

- a. jangka pendek, berupa cara-cara menangani masalah krisis yang berlangsung
- b. jangka panjang, ditujukan untuk menghilangkan struktur ketimpangan sosial, kelas dan bangsa.

Program Pemerintah

Upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat, terutama dalam menanggulangi masalah kemiskinan, telah dilaksanakan melalui beberapa inpres dengan pola pendekatan kesejahteraan, yaitu:

1. Inpres Desa Tertinggal, tujuannya adalah menciptakan kesetaraan desa dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan
2. Inpres kesehatan, tujuannya adalah memberikan layanan kesehatan yang mudah dan murah untuk penduduk pedesaan.
3. Inpres pendidikan, tujuannya adalah memberikan layanan pendidikan yang gratis untuk pendidikan dasar sampai menengah.
4. Inpres obat-obatan, tujuannya adalah untuk memberikan obat-obatan yang murah kepada masyarakat miskin.

5. Inpres-inpres lainnya, yang prinsipnya adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan.

Di samping inpres-inpres tersebut, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang tujuannya adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk pedesaan, misalkan:

1. Ketentuan mengenai Kredit Usaha Tani, untuk memudahkan petani mendapatkan modal untuk mengolah tanah.
2. Ketentuan mengenai kredit perbankan (KIK atau kredit candak kulak) tujuannya adalah memberikan kemudahan rakyat untuk mendapatkan modal untuk usaha diluar sektor pertanian.
3. Pembebasan pajak untuk hasil pertanian.
4. Subsidi atas pupuk dan obat-obatan pertanian.
5. Penetapan harga dasar gabah, untuk menjamin nilai tukar petani (padi) tidak turun, bahkan meningkat terhadap hasil produk industri lainnya.
6. Pola KKPA untuk sistim transmigrasi terpadu, tujuannya adalah menjamin para transmigran mendapatkan penghasilan yang tetap dan alat produksi.
7. dan lain-lain.

Pelaksanaan Dalam Pembangunan Masyarakat Melalui Pemberdayaan

Dalam pelaksanaan pembangunan ini, peran birokrasi pemerintah hingga ke tingkat desa/kelurahan, selaku unsur penanggung jawab, pelaksana dan pendamping (fasilitator) berupaya untuk merangsang kreativitas, dan memotivasi masyarakat agar memiliki *self-confidence* untuk berkiprah dalam pembangunan.

Untuk itu diperlukan *capability* dan *capacity organization*, yaitu unsur birokrasi pemerintahan yang kuat, dalam aspek administratif dan transformasi sosial budaya melalui pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah memerlukan suasana transformasi pembangunan sosial yang menuntut:

- a. profesionalisme
- b. sikap kemitraan
- c. keteladanan

Bentuk transformasi pembangunan masyarakat yang strategis mengacu pada keterkaitan dan kepadanan berbagai kepentingan.

Tujuannya:

- a. Menumbuhkan pengetahuan
- b. Menumbuhkan keterampilan, dan
- c. Menumbuhkan motivasi

Pada masyarakat miskin, untuk:

- a. memperkuat permodalan
- b. peluang kerja dan usaha

Melalui pelembagaan masyarakat penerima bantuan, agar tumbuh:

- a. sifat gotong royong
- b. swadaya
- c. partisipasi aktif

Sebagai Subyek Pembangunan

Sasaran dalam menerapkan perubahan-perubahan kepada masyarakat adalah seluruh warga desa. Apabila hendak mengadakan perubahan sosial, tidak cukup hanya merubah secara individual saja. Diperlukan perubahan mental dalam aspek etika, adat, kebiasaan, cara berpikir dan cara menilai yang dimiliki masyarakat setempat. Sehingga diperlukan mengubah suasana kerja, kebiasaan, cara berpikir dan cara menilai yang dimiliki masyarakat setempat. Sehingga diperlukan mengubah suasana kerja, kebiasaan rapat, musyawarah dan cara berpikir dari kebanyakan orang, sebab orang biasanya mengikuti kebiasaan, sikap dan pendapat orang lain.

Dalam mengembangkan masyarakat diperlukan membangkitkan kemauan, kemampuan dan kepercayaan pada diri sendiri agar mereka mau terlibat secara aktif dalam pembangunan. Juga, agar

mereka bergerak secara metodis, berdaya guna dan terorganisir, untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Untuk itu diperlukan kelompok kerja.

Kelompok kerja dalam rangka pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan adalah kelompok dari warga masyarakat yang mau menyumbangkan pikiran dan tenaganya secara sukarela demi kemajuan masyarakat setempat. Suatu kelompok kerja merupakan suatu metode bersama dari warga yang mau aktif dalam pembangunan.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kelompok kerja:

- a. non politis, terbuka bagi semua golongan
- b. terdiri atas 5-12 anggota, idealnya antara 6-8 orang
- c. terdiri dari sukarelawan yang aktif, bukan yang mencari keuntungan materi
- d. berkumpul secara periodik, misalnya setiap hari tertentu dalam setiap minggu
- e. kelompok bergerak dalam satu bidang kegiatan tertentu
- f. kelompok kerja bersifat sebagai inti dari satu bidang kegiatan.

Jadi kelompok kerja ini tidak hanya untuk anggotanya saja, tapi juga untuk kemajuan warga diluar kelompoknya.

Teknis Pelaksanaan "Intervensi" di Lapangan

Dalam pelaksanaan di lapangan, kelompok kerja perlu melakukan beberapa langkah:

Pertama, memberikan **informasi** dengan pengetahuan baru, melalui pendidikan kepada masyarakat dan berusaha menghilangkan pandangan sempit mereka yang terbatas. Pelaksanaan bisa melalui ceramah atau diskusi dengan para ahli, melalui film, kunjungan ke tempat lain, slide, buku-buku yang menunjukkan daerah yang lebih maju, lengkap dengan cara kerja dan cara hidupnya.

Kedua, melaksanakan **diskusi** dalam kelompok kecil membahas pengetahuan yang diperolehnya, mengenai pengetahuan, masalah dan hal-hal baru. Kelompok kecil ini sebaiknya terdiri dari 5-12 orang, yang memungkinkan mereka bertukar pendapat secara pribadi dan santai. Anggota kelompok hendaknya saling menguatkan diantara mereka.

Ketiga, melalui **pendidikan dan latihan** dalam kelompok kecil secara intensif diwujudkan wadah baru, suatu organisasi bisa dalam bentuk koperasi simpan pinjam, organisasi pemuda, organisasi wanita dan sebagainya. Organisasi tersebut hendaknya bekerja secara metodis, terarah, sistematis dengan penuh tanggung jawab, (bercitra baik), sehingga diharapkan mampu mempengaruhi warga secara positif. Diharapkan organisasi ini berfungsi dengan baik dalam melayani kebutuhan warganya, yang ditunjang dengan manajemen yang baik, sehingga dapat merubah cara kerja dan cara berpikir pegawainya.

Metode kelompok kerja memberi dasar untuk suatu kerjasama di desa yang lebih berdaya guna. Inti dari metode kelompok kerja adalah rapat kerja. Terdapat beberapa langkah utama yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan suatu usaha bersama (proyek). Menurut *Burch* dan *Starter* dalam rangka pemecahan masalah sosial-budaya terdapat enam langkah penting yang digunakan yakni:

- a. Perumusan masalah sosial-budaya (*formulation of the problem*) berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.
- b. Pengembangan pemecahan-pemecahan alternatif (*development of alternative solution*). Dari masalah dikembangkan beberapa alternatif yang akan dipilih.
- c. Pembuatan model-model yang membentuk alternatif-alternatif (*construction of models which formalize the alternatives*). Dari alternatif yang terpilih dikembangkan model yang akan digunakan dalam pemecahan masalah.

- d. Efektifitas keberhasilan alternatif-alternatif dan penentuan biaya (*effectiveness of the alternatives and determination of the cost*). Dengan memperhitungkan dan membandingkan keberhasilan yang akan dicapai dengan pembiayaan yang direncanakan.
- e. Pengajuan saran-saran (*presentation of recomondation*). Merencanakan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan, seperti sumber daya, narasumber, kerjasama dan lain-lain.
- f. Pelaksanaan alternatif yang dipilih (*implementation of the chosen alternative*). Pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah.

Tugas penting dalam melaksanakan pemecahan masalah sosial-budaya adalah memaksimalkan keberhasilan pemecahan masalah dengan biaya yang minimum. Untuk mencapai keberhasilan ini perlu membandingkan beberapa alternatif pemecahan masalah, karena setiap alternatif pemecahan memerlukan penggunaan sumberdaya tertentu dan diperhitungkan akan menghasilkan keluaran pada tingkat keberhasilan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuncoro, M. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP Ampykn, Yogyakarta.
- Mubyarto. 1998. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Aditya Media, Yoyakarta.
- Salamah, U. 1999. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. FISIP Unpas, Bandung.
- Supriatna, T. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Humaniora, Bandung.
- Jomo, F. W. 1986. *Membangun Masyarakat*. Alumni, Bandung.